

**PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS – AKTIF INDONESIA PADA
MASA ORDE LAMA**

Elias P. R. Lala¹, Max Tamon², Ruth Umbase³

Jurusan Pendidikan Sejarah, FIS, Universitas Negeri Manado

E-mail : aldosanto.AI@gmail.com, maxtamon@unima.ac.id, ruthumbase@unima.ac.id

Article History

Received : 2022-12 -15

Accepted : 2022-12-29

Published : 2022-12-30

Abstrak - Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang bertujuan mengemukakan suatu strategi yang diterapkan oleh Indonesia dalam *men-design* politik luar negerinya untuk menjalankan hubungan luar negeri dengan negara-negara lain di mana saat itu Indonesia sebagai negara baru dalam dunia internasional serta dampaknya bagi Indonesia sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan strukturalis dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah dengan tahapan: observasi historis, kritik sejarah, generalisasi dan analisis sebab-akibat. Hasil penelitian ini menggambarkan strategi Indonesia dalam politik luar negerinya yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional dan cita-citanya sebagai negara baru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada berdasarkan pada landasan Idiil yakni Pancasila dan landasan Konstitusional yakni amanat UUD 1945, serta kondisi dalam dan luar negeri pada waktu itu. Dalam pelaksanaannya, terdiri atas masa demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan pembebasan Irian Barat. Politik luar negeri bebas-aktif memberikan beberapa pengaruh bagi Indonesia baik dalam bidang ekonomi, politik dan sosial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi yang dilaksanakan Indonesia dalam menjalin hubungan diplomasinya ditujukan untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional dan sebagai jawaban dari kondisi dunia internasional pada masa itu.

Kata Kunci: *Strategi, Politik Bebas-Aktif, Dampak*

**IMPLEMENTATION OF FREE FOREIGN POLITICS – ACTIVE INDONESIA IN THE
OLD ORDER TIME**

Elias P. R. Lala¹, Max Tamon², Ruth Umbase³

Jurusan Pendidikan Sejarah, FIS, Universitas Negeri Manado

E-mail : aldosanto.AI@gmail.com¹, maxtamon@unima.ac.id, ruthumbase@unima.ac.id

Abstract – This research is a historical research that aims to present a strategy that is applied by Indonesia in designing its foreign policy to carry out foreign relations with other countries where at that time Indonesia was a new country in the international world and its impact on Indonesia itself. This research uses a structural approach with the research method used is the historical method with the stages: historical observation, historical criticism, generalization, and causal analysis. The results of this study describe Indonesia's strategy in its foreign policy which is used to achieve its national goals and ideals as a new country to solve existing problems based on the Idil foundation, namely Pancasila and the constitutional basis, namely the mandate of the 1945 constitution, as well as domestic and foreign conditions at that time. In its implementation, it consists of period of liberal democracy, guided democracy and the liberation of West Irian. Free – active foreign policy has given several influences to Indonesia in the economic, political and social fields. The conclusion of this study is that the strategy implemented by Indonesia in establishing diplomatic relations was aimed at achieving national goals and ideals and as an answer to the conditions of the international world at that time

Keywords: *Strategy, Free Active Politics, Impact*

PENDAHULUAN

Strategi hubungan internasional adalah arah pendekatan suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan negara itu dalam dunia internasional. Strategi politik internasional ini adalah metode atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin negara dalam menjalin hubungan dengan berbagai negara atau unit politik dunia lainnya yang ditujukan untuk kepentingan negara itu sendiri. Dalam rangka mempersiapkan kebijakan politik internasionalnya, Indonesia mencanangkan strategi kebijakan luar negerinya yang bebas dan aktif, baik pada masa pemerintahan Presiden Soekarno (orde lama) maupun pada masa pemerintahan Presiden Soeharto (orde baru) (Arifin, 2018).

Setelah kemerdekaan, Indonesia sebagai negara merdeka yang baru menunjukkan tingkat kemiskinan yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, dan kebiasaan dikatator dan merancang untuk kemungkinan di masa depan tentu saja banyak hal yang bergantung pada wawasan dan tata pemerintahan (Ricklef, 2008). Secara politis keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu mapan. Ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terus terjadi (Rahman, n.d.). Hal ini tidak lain karena masih ada kekuatan asing yang tidak rela kalau Indonesia merdeka. Bangsa Indonesia masih harus berhadapan dengan sisa-sisa kekuatan Jepang, dimana Jepang beralasan bahwa mereka diminta sekutu untuk tetap menjaga Indonesia. Di samping menghadapi kekuatan Jepang, bangsa Indonesia harus berhadapan dengan tentara Inggris atas nama sekutu, dan juga NICA (Belanda) yang berhasil datang kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu.

Didapatkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat dikatakan sebagai awal dari revolusi Indonesia. Sementara itu, terjadi ketegangan antara dua negara *super power* di dunia yang menyebabkan pertikaian di antara dua negara tersebut, dalam hal ini dikenal dengan blok barat dan blok timur. Dimana pada masa itu menjadi *defiance* untuk Soekarno yang memimpin Indonesia pada saat itu.

Persaingan kedua negara besar tersebut dikarenakan perbedaan pemahaman atau kontras

filosofis yang dimiliki atau dipegang kedua negara, dimana Uni Soviet menganut paham komunis dan Amerika Serikat menganut paham liberal-kapitalis. Hal ini mengakibatkan jarak diantara kedua negara tersebut karena ketidaksepemahaman cara pandang mengenai rekonstruksi dan konservasi setelah PD II dimana Uni Soviet menginginkan sebuah sistem yang demokratis dalam pemerintahan namun bertolak belakang dengan Amerika Serikat yang berfokus pada keamanan negara (Sulfachriadi, 2015)

Dalam perjuangan Indonesia kehadiran Soekarno dan Hatta sebagai Dwi Tunggal memberikan pengaruh yang signifikan bagi kemajuan Indonesia dalam menentukan strategi yang secara eksplisit diidentikan dengan strategi hubungan internasional Indonesia sehingga mengarahkan politik luar negeri Indonesia agar semakin baik dan unggul. Situasi saat itu, sudah tidak memungkinkan lagi dikarenakan konflik dua negara tersebut sudah merambat ke berbagai kawasan termasuk Asia dan terlebih khusus di kawasan Asia Tenggara yang berdampak pada negara-negara di kawasan tersebut yang membuat Indonesia harus segera menentukan arah kebijakan luar negerinya pada saat itu. Dipandang secara khusus, Indonesia sebagai negara yang baru mendapatkan kemerdekaan dan pada saat itu Indonesia berusaha untuk meminta bantuan dari negara-negara di dunia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatannya secara sah. Terlebih lagi, Indonesia masih harus berusaha penuh dalam perjuangannya untuk menyelesaikan konfliknya dengan Belanda dan mempertahankan kemerdekaan yang didapatkan setelah perjuangan yang panjang dan hal itu membutuhkan bantuan dari negara-negara lain karena Belanda belum menganggap secara sah kemerdekaan Indonesia dan masih berkonflik senjata dengan Indonesia.

Kebijakan luar negeri Indonesia secara otoritatif dan resmi terwujud ketika Mohammad Hatta sebagai perdana menteri Indonesia menyatakan di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) sehubungan dengan situasi politik Indonesia pada September 1948. Hatta menyatakan secara terang-terang, Indonesia tidak akan berpihak pada salah satu blok melainkan bersifat netral. Indonesia sendiri berusaha mengharmonisasikan perdamaian dunia

yang sejak lama diimpikan dengan memfasilitasi jalan damai dengan bersikap bersahabat atau dekat dengan semua negara tidak memandang blok manapun. Dengan hal-hal demikian, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara. Indonesia juga tidak bersedia mengadakan atau ikut campur dengan suatu blok ketiga dengan maksud mengimbangi kedua blok raksasa itu. Dengan demikian Indonesia dapat memahami keyakinan tentang perjuangan kemerdekaan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, dalam mewujudkan tujuannya Indonesia menerapkan dua strategi dalam implementasi kebijakan luar negerinya. Strategi yang pertama yaitu dengan perjuangan fisik dimana hal ini didasari pada keyakinan bahwa kemerdekaan penuh hanya bisa dicapai dengan cara konfrontasi dengan tidak memandang kompromi dengan negara-negara penjajah. Strategi yang kedua yaitu dengan diplomasi yang digunakan sebagai alat untuk menjamin penyerahan kedaulatan. Hal ini didasari pada kesadaran pemerintah Indonesia bahwa cita-cita dan harapan bangsa tidak akan tercapai tanpa hubungan diplomasi untuk mendapatkan dukungan internasional.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti mengambil judul “Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Pada Masa Orde Lama”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 9 bulan (Oktober 2020 – Juni 2021) dengan menggunakan metode sejarah menurut Marc Bloch.. Dalam metode ini ada empat tahapan yang dilakukan, lebih spesifiknya: Pertama, mengarahkan persepsi otentik.(Penulis et al., 2022) Kedua, melakukan analisis yang dapat diverifikasi atau pengujian informasi. Ketiga, meringkas serta mengklasifikasikan informasi seduai dengan masalah. Keempat, melakukan inkuiri (pemeriksaan) terhadap hasil akhir dari masalah yang disusun.

Penelitian ini menggunakan pendekatan struktural yang mengkonsolidasikan antara pendekatan peristiwa dengan pendekatan

struktural. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka/dokumen. Data – data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis historis yakni melakukan kritik ekstern dan intern untuk mencari otentitas dan kredibilitas sumber yang didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Netralitas Dalam *Design* Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Strategi berasal dari kata Yunani yaitu *strategos*, yang berarti Jenderal. Hal ini mengacu pada apa yang menjadi perhatian utama suatu aktivitas. Menurut Kenneth Andrews seorang akademisi yang mempopulerkan konsep strategi bisnis, strategi diartikan sebagai pola sasaran, tujuan, dan kebijakan/rencana umum untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, yang dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, atau yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan. Adapun strategi diartikan sebagai “ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau kiat muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan”. Jika diterjemahkan dari perspektif politik luar negeri, strategi dapat diartikan sebagai teknik atau taktik yang dilakukan oleh suatu negara dalam melakukan suatu hubungan diplomasi berdasarkan kebijakan atau rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan dalam kurun waktu tertentu. Netralitas sendiri berasal dari asal kata “netral” yang berarti tidak berpihak. Netralitas sendiri dapat diartikan sebagai keadaan dan sikap netral (tidak memihak, bebas), sehingga seseorang dapat dikatakan netral apabila ia tidak memihak kepada dua atau lebih orang atau memihak kepada organisasi atau lembaga penentuan sesuatu. Jika dipandang dari konsep politik luar negeri, maka netralitas adalah ketidakberpihakan suatu negara dalam permasalahan atau perseteruan negara lain (misalnya peperangan), dan berusaha menghindar agar tidak terlibat dalam perseteruan tersebut.

Jadi, strategi netralitas dapat diartikan sebagai suatu teknik atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai

tujuan yang telah direncanakan melalui hubungan diplomasinya dengan usaha menghindari keberpihakan pada pihak manapun dan mengedepankan pada prinsip netral sesuai dengan kebijakan luar negerinya. Hal ini sesuai dengan implementasi dari strategi luar negeri Indonesia (Bebas dan Aktif). Dapat dikatakan Indonesia menerapkan metode netralitas dalam pelaksanaan hubungan internasionalnya dimana Indonesia bebas untuk membangun hubungan dengan negara manapun tanpa memihak salah satu pihak antara blok Barat ataupun blok Timur serta berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Kebijakan luar negeri yang netral ini berlandaskan pada UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Selama pemerintahan orde lama, kebijakan luar negeri yang dijalankan Indonesia bersifat netral sejalan dengan tujuannya yang berusaha mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia berpatokan pada strategi netralitas.

Perseteruan Blok Barat dan Blok Timur (Perang Dingin)

Pertikaian kedua negara *super power* yang tergabung dalam dua blok besar yang jika diistilahkan tidak ada istilah lain yang cocok selain perang dingin yang menggambarkan kondisi dunia internasional pada masa itu. Perang dingin adalah suatu bentuk perang yang pada umumnya tidak menggunakan kekuatan angkatan bersenjata secara langsung, tetapi menggunakan cara-cara, alat-alat, dan kekuatan-kekuatan ideologi, politik ekonomi, sosial budaya, dan alat-alat lain yang serupa dengan itu guna mencapai tujuan nasional (Murtamadji, 2009: 85). Kondisi perang dingin tersebut menggambarkan dua kekuatan besar dunia yang berkonflik (blok barat dan blok timur). Penyebutan blok barat dan blok timur merujuk pada pengkotakkan atau pembagian negara yang sama tujuannya. Blok Timur sendiri dengan ideologi sosial-komunis dan blok Barat dengan ideologi liberal-kapital. Masing-masing blok dipimpin oleh negara *super power* yakni Uni Soviet (Timur) dan Amerika Serikat (Barat).

Menurut Robert McNamara, “konflik perang dingin ini terjadi karena AS telah melakukan salah persepsi (*misperception*) tentang ideologi komunis yang menekankan *class struggle*” (Mujiyati, 2016). Amerika Serikat sendiri memberikan artian terhadap aliran “*Socialism in One Country*” sebagai satu-satunya negara sosialis yang menguasai dunia yang dikehendaki oleh Uni Soviet. Disisi lain blok timur yakni Soviet yang tidak setuju dengan blok barat yang menghendaki sistem pemerintahan yang demokrasi untuk negara-negara Eropa (Sulfachriadi, 2015).

Perbedaan pendapat dan saling curiga satu sama lain tersebutlah yang menciptakan jurang pemisah diantara kedua blok tersebut. AS yang tidak ingin tersaingi sehingga melakukan berbagai upaya untuk berusaha menekan perkembangan komunis dengan memberikan bantuan kepada negara-negara di Eropa Barat serta melakukan perjanjian dengan beberapa negara. Ketidakharomisan ini dibuktikan dengan dibentuknya pakta pertahanan dimasing-masing blok.

Indonesia Dalam Gerakan Non – Blok

Konferensi Tingkat Tinggi Non-Blok dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari Konferensi Asia Afrika sehingga solidaritas Asia Afrika, masih terasa dominan dalam konferensi ini dan semangat Bandung serta dasasila Bandung masih berkumandang. Selain itu, seharusnya dilaksanakan Konferensi Asia Afrika II di Aljazair pada tanggal 29 Juni 1965 diundur karena terjadi kudeta di negara tersebut dan rencana konferensi diundur sampai pada tanggal 5 November 1965 namun gagal diselenggarakan.

Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara Non Blok yang pertama dilaksanakan di Beograd, Jugoslavia, mulai tanggal 1 sampai dengan 6 September 1961, dihadiri oleh 25 negara termasuk Indonesia (Widjaja, 1985: 31). Tiga negara hadir sebagai peninjau yaitu, Bolivia, Brazilia, dan Equador. Dilihat dari sudut geografi, maka menurut benua masing-masing, peserta dari Asia berjumlah 12, Afrika 11, Eropa 1 dan Amerika Latin 1 ditambah dengan tiga

peninjau (Marwati, 1984). Konferensi ini telah menghasilkan tiga dokumen, yaitu :

- a. Pernyataan tentang bahaya perang dan appeal untuk perdamaian.
- b. Deklarasi mengenai prinsip-prinsip non-alignment, bersama dengan 27 ketentuan persetujuan tentang pemecahan masalah-masalah dunia waktu itu.
- c. Surat bersama kepada Presiden Kennedy dan PM Khrushchev yang "*urging on the Great Powers concerned that negotiation should be resumed and pursued so that the danger of war might be removed from the world mankind adopts ways of peace*". (Marwati, 1984: 347)

Selanjutnya, sebagai lanjutan dari KTT I maka dalam bulan Juli 1962 dilaksanakan KTT II di Kairo. KTT Non-Aligned II di Kairo itu telah dihadiri oleh 47 negara peserta dan peninjau-peninjau lainnya ialah Sekretaris Jenderal Organisasi Persatuan Afrika dan Liga Arab.

Terdapat perbedaan antara Konferensi I dan II dimana konferensi ke II berlangsung dalam suasana dunia berlainan. Konferensi I diadakan dalam suasana *perang dingin* sedangkan yang ke II antara Moskow dan Washington tidak terdapat lagi ketegangan-ketegangan seperti pada tahun 1961. Meskipun demikian, keadaan ini tidaklah berarti bahwa tugas Konferensi telah menjadi lebih muda. Kenyataan menunjukkan adanya situasi pertentangan di dalam tubuh Asia dan Afrika sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertentangan India-pakistan dan India-RCC memuncak, sehingga India berkeberatan jika Pakistan dan RCC diundang.
- b. Konfrontasi Indonesia-Malaysia, sehingga Indonesia menolak diundangnya Malaysia.
- c. Beberapa negara Afrika menentang hadirnya PM Tshombe dari Kongo, sehingga ketika pesawat PM tshombe hendak mendarat di Kairo, pemerintah RPA telah terpaksa melarangnya. (Marwati, 1984)

KTT Non-Blok sendiri diselenggarakan sebanyak tujuh kali. Setelah Konferensi I di Beograd dan Konferensi II di Kairo maka Konferensi III dilaksanakan di Lusaka (Zambia)

tahun 1970, KTT IV dilaksanakan di Aljazair tahun 1973, KTT V dilaksanakan di Colombo, Srilanka tahun 1976, KTT VI di Havana, Cuba tahun 1979 dan KTT VII di New Delhi, India tahun 1983. Seharusnya KTT VII akan diadakan di Bagdad, Irak tetapi karena terlibat perang Irak-Iran dipindahkan ke India tersebut (Widjaja, 1985).

Peranan gerakan non-blok sampai saat ini tetap penting sejak KTT pertama di Beograd, Jugoslavia tahun 1961 yang dihadiri oleh 25 negara yang hampir setiap negara dunia ketiga yang merdeka menjadi anggota non-blok. Gerakan Non-Blok sampai saat ini masih melanjutkan usahanya meredakan ketegangan dan konflik di dunia serta menentang terbentuknya blok-blok. Dalam menghadapi semua situasi konflik yang ada, gerakan non-blok melanjutkan usahanya memperkuat penyelesaian politik yang damai sesuai dengan hukum. Prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri lain telah kabur dan sulit untuk ditetapkan. Intervensi pada gerakan non-blok terjadi di beberapa negara baik Asia maupun Afrika (Widjaja, 1985).

Oleh karena KTT Non-Blok di Kairo tidak dapat memenuhi tuntutan garis militan Indonesia, sedangkan usaha-usaha untuk menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika II mengalami kegagalan, maka untuk memenuhi kepentingan politik luar negerinya yang mencusuar maka sasaran diplomasi diarahkan kepada:

- a. Usaha menarik negara-negara Afrika dan Timur Tengah sebanyak mungkin untuk menyokong rencana Indonesia mengadakan suatu *conference of the New Emerging Forces* atau disingkat CONEFO.
- b. Pembentukan Poros Jakarta, Pnom Penh, Hanoi, Peking Pyong Yang sebagai poros anti-imperialis dan anti-kolonialis. (Marwati, 1984)

Akibat dari politik poros tersebut mengakibatkan ruang gerak Indonesia menjadi sempit terutama dalam hal diplomasinya di forum internasional. Penyimpangan dalam hal prinsipil dari landasan strategi kebijakan internasional Indonesia yang bersifat netral (bebas dan aktif) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk

mewujudkan perdamaian dunia serta rana strategi politik RCC yang telah dimasuki Indonesia. Peristiwa G30S/PKI yang terjadi pada September 1946 menjadi titik puncak dari penyelewengan yang telah berkembang dari UUD 1945 dan Pancasila (Marwati, 1984).

Amanat UUD 1945

Ide strategi internasional yang dilakukan Indonesia pada saat itu tidak dapat dipisahkan dari UUD 1945 sebagai landasan konstitusional kebijakan tersebut. (Sulfachriadi, 2015). Hal ini dapat dilihat dari perintah/isi yang terkandung dalam alinea empat UUD 1945 yang mewajibkan setiap masyarakat Indonesia untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban duni yang berdasar pada kerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berkaitan dengan kondisi saat itu yang menghadapkan Indonesia pada dua faktor yaitu faktor dari dalam maupun faktor dari luar. Faktor dari dalam dapat dilihat dari kondisi Indonesia saat itu yang baru saja menjadi negara merdeka. Sedangkan faktor dari luar terkait masalah kedua blok besar saat itu. Oleh karena itu, untuk menghindari kedua faktor dalam dan luar itu diperlukan sebuah konsep politik yang tidak berpihak dan tidak mengikat pada blok manapun, hal ini sejalan dengan kepentingan saat itu untuk mencapai tujuan nasional. Sebuah gagasan tentang strategi internasional tidak dapat bertentangan dengan kepentingan umum bangsa yang sebenarnya. Dengan demikian kepentingan umum Indonesia secara tegas tertuang dalam UUD 1945. Ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan telah menjadi satu kesatuan yaitu UUD 1945 sebagai landasan konstitusional Indonesia dan Pancasila sebagai landasan idiil. Butir-butir Pancasila ideal digunakan sebagai acuan yang mendasar untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, strategi internasional Indonesia harus tercermin dari landasan idiil Indonesia (Pancasila). Landasan-landasan ini memiliki sifat tetap sehingga tidak bisa diganti. Dalam sejarah, UUD 1945 tergantikan oleh UUDS 1950 disebabkan oleh karena ideologi serta cita-cita bangsa tergeser akibat dampaknya kedua blok yang memosisikan

Indonesia sangat diantara kedua kekuatan tersebut sehingga sangat sulit untuk mempertahankan sikap netralnya melalui *non alignment* movements (Gerakan Non-blok).

Sebuah negara yang dipandang sebagai suatu organisasi yang terikat pada landasan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga strategi hubungan internasional yang bersifat netral (bebas-aktif tersebut tidak bisa bertolak belakang dengan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dari negara Indonesia yang menjadi aturan dalam memutuskan setiap pengaturan, baik kebijakan dia dalam negeri maupun kebijakan dalam berhubungan di dunia internasional. Basis fungsional Indonesia berfluktuasi yang didasari oleh kepentingan publik sesuai dengan masa pemerintahan saat itu. Dalam keadaan khusus ini, kepentingan umum Indonesia ketika Soekarno menjalankan pemerintahannya diekspresikan dalam tatanan politik. Kepentingan umum tersebut seperti menjaga kehidupan kenegaraan yang tenang, tidak ikut campur dalam konflik negara lain, bertetangga dan berpartisipasi secara aktif dala segala bidang, seperti masalah legislatif ala kontrak PBB. “Pada masa konflik kembalinya kolonialisme ke Indonesia, Preseiden Soekarno menegaskan arah politik luar negerinya ke dalam Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia, yakni mengabdikan untuk kemerdekaan nasional, perjuangan kemerdekaan, dan pembelaan perdamaian (KKP-RI)” (Sulfachriadi, 2015). Hal itu berdasarkan pada keputusan Dewan Pertimbangan Agung dengan keputusan No.2/Kpts/Sd/I/61, pada tanggal 19 Januari 1961.

Berdasarkan keputusan tersebut dan pidato Soekarno pada tahun 1961 maka prinsip politik bebas aktif adalah jawaban untuk masalah yang dihadapi di dunia internasional. Berdasarkan standar politik, permasalahan sebagai negara baru dapat teratasi oleh prinsip politik tersebut walaupun melibatkan negara lain dan tidak melenceng dari UUD 1945 sebagai landasan konstitusional Indonesia (Sulfachriadi, 2015: 36). Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan menyangkut landasan operasional sebuah negara haruslah disusun dengan tidak bertentangan dengan landasan konstitusional

negara itu sendiri. Hal ini dikarenakan sebuah landasan konstitusional terdapat cita-cita dan tujuan didirikannya negara tersebut yang dipandang sebagai organisasi kemasyarakatan.

Kondisi Indonesia Tahun 1945 – 1949

Setelah mendapatkan pengakuan kedaulatan pada tahun 1949, bangsa Indonesia berusaha mempertahankan kedaulatannya sebagai sebuah negara merdeka dari Belanda yang berusaha menjajah Indonesia lagi. “Perekonomian pada awal kemerdekaan merupakan sebuah masalah yang serius dihadapi oleh pemerintah Soekarno pada waktu itu” (Marwati, 1992). Kebijakan yang dilakukan pada saat itu adalah dengan mengeksport barang untuk memenuhi kebutuhan negara dan memperbaiki ekonomi yang melemah. Langkah ini dilakukan agar negara terpenuhi segala kebutuhannya.

Akan tetapi, hambatan terus saja berdatangan dari pihak Belanda yang datang mencoba menduduki Indonesia kembali sehingga menghambat dalam pemulihan pembangunan ekonomi dalam negeri. Hambatan berupa pertemburan yang terjadi sampai pada blockade ekonomi pun dilakukan oleh Belanda sehingga mempengaruhi kondisi dalam negeri Indonesia pada saat itu. Salah satu isu politik saat itu setelah KMB 1949, Belanda bersikeras hanya mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat dan bukan Republik Indonesia. Adapun isu ekonomi yang terjadi yaitu: *Pertama*, Belanda memaksakan suatu perjanjian Keuangan-Ekonomi (*Financieel-Economische Overeenkomst*, Finec) yang akan mengamankan kepentingan-kepentingan bisnis Belanda dan juga penerimaan pemerintah Belanda yang bersumber dari kepentingan bisnis tersebut. *Kedua*, Belanda menuntut agar pemerintah Indonesia mengambil alih semua utang baik utang Hindia Belanda sebelum perang kemerdekaan maupun utang yang diakibatkan oleh pemerintah sipil Hindia-Belanda (*Netherlands Indies Civil Administration*, NICA) setelah perang (Sundari, 2017).

Blockade yang dilakukan oleh pihak Belanda membuat Indonesia berusaha mencari cara untuk mengatasinya. Usaha Indonesia mulai

terlihat hasilnya, dimana Indonesia yang mengeksport beras dibalas oleh India dengan mengirimkan bantuan berupa pakaian untuk memenuhi kebutuhan Indonesia. Adapun *Indonesian Office* berupa hubungan dagang dengan Singapura sebagai salah satu langkah diplomasi yang dilakukan Indonesia. Inflasi pun terjadi di Indonesia akibat blockade yang dilakukan Belanda dimana mata uang Jepang tersebar secara bebas dan tidak dapat dikendalikan dikarenakan Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Hal ini mengakibatkan kebutuhan dalam negeri harus didatangkan dari luar negeri.

Kedaulatan dan persatuan bangsa pada saat itu masih terus diuji dengan ancaman dari NICA dan kondisi dalam negeri yang belum stabil (Ayuningtyas, 2016). Orang-orang yang mendukung revolusi dapat ditarik perbedaan antara kekuatan perjuangan bersenjata dan kekuatan diplomasi, antara mereka yang mendukungnya dan mereka yang menentangnya. Hal ini merupakan suatu gambaran mengenai suatu masa ketika perpecahan menimpa bangsa Indonesia secara beragam dan terus-menerus berubah. Sedangkan, bagi para pemimpin revolusi Indonesia, tujuannya adalah melengkapi dan menyempurnakan proses penyatuan dan kebangkitan nasional yang telah dimulai empat dasawarsa sebelumnya.

Pelaksanaan Strategi Politik Luar Negeri Indonesia Era 1950-an

a. Era RIS dan Demokrasi Liberal (1949 – 1959)

Sejarah baru telah dimulai bagi pemerintahan Indonesia. Sejarah perjalanan tersebut ditandai dengan KMB (konferensi Meja Bundar) di Den Haag tanggal 23 Agustus 1949. Kesepakatan yang disetujui bersama yang diambil oleh Indonesia dan Belanda mengharuskan Indonesia berbentuk serikat untuk sistem pemerintahannya. Hal ini berarti dalam satu negara terdapat negara-negara bagian di dalamnya. RIS terdiri dari 16 negara bagian dengan masing-masing mempunyai luas daerah

dan jumlah penduduk yang berbeda-beda (Marwati, 1984).

Mengenai hubungan diplomasi kedua negara, Indonesia sendiri mencoba menjalin hubungan diplomatik dengan Belanda dikarenakan maksud dan tujuan untuk mendapatkan kejelasan terkait permasalahan Irian Barat. Permasalahan Irian Barat menjadi salah satu konflik berkepanjangan antara kedua negara itu dikarenakan pemerintah Belanda masih berkuasa di wilayah tersebut. Berdasarkan keputusan KMB masalah Irian Barat akan dirundingkan secara khusus setelah pengakuan kedaulatan RIS. Perundingan terkait permasalahan Irian Barat ini direncanakan akan diadakan satu tahun kemudian setelah Indonesia mendapatkan kedaulatannya.

Akan tetapi, sampai akhir tahun 1949, tidak ada kejelasan terhadap status Irian Barat. Bahkan sampai pada kembalinya bentuk negara Indonesia ke dalam bentuk negara kesatuan, masalah Irian Barat belum terselesaikan.

Kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan didasari pada usaha Belanda untuk menghancurkan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945 tanggal 17 Agustus dengan membentuk negara federal oleh sebagian masyarakat Indonesia. "Hal itu terlihat di dalam lingkungan negara-negara buatan Belanda terdapat gerakan Republikain yang kuat dan berhasrat menegakkan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet RIS di bawah pimpinan Hatta memerintah sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada saat itu RIS menjelma menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (RI)" (Marwati, 1984).

Tanggal 6 September 1950, dengan menganut sistem demokrasi parlementer, dengan demikian jalannya pemerintahan NKRI resmi dimulai dengan terbentuknya kabinet Natsir yang memulai masa pemerintahannya.

1. Kabinet Natsir (7 September 1950 – 21 Maret 1951)

Hubungan diplomasi Indonesia menjadi fokus juga dari kabinet ini. Hal ini nyata terbukti dengan masuknya Indonesia sebagai anggota secara resmi ke PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tanggal 28 September 1950. Seperti halnya negara-negara baru, RI juga tentu

berminat untuk menjadi anggota PBB, karena dengan demikian akan dapat meraih pengakuan dunia internasional yang saat itu sedang gigih diperjuangkannya (M Sabir, 1987: 99). Ada perundingan untuk membahas masalah Irian Barat kembali diadakan pada tanggal 4 Desember 1950 antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda. Namun, perundingan tersebut tidak menghasilkan solusi yang baik. Hal yang mendasari tidak menemukan jalan dalam perundingan ini dikarenakan pemerintah Hindia Belanda tidak ingin melepaskan Irian Barat dan berkomitmen penuh seperti halnya pada saat perundingan di Den Haag, dimana dalam KMB Belanda tidak akan melepaskan wilayah Irian Barat. Tanggal 3 Maret 1951 penandatanganan perjanjian persahabatan dengan negara di kawasan Asia khususnya dalam hal ini Asia Selatan yaitu dengan Pakistan. Dalam perjanjian tersebut kedua negara berfokus pada jalan damai dari kedua pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi nantinya. Hal ini terlihat jelas dari salah satu pasal diantara pasal-pasal lainnya dalam perjanjian tersebut. Selain kesepakatan persahabatan dan perdamaian yang disepakati kedua negara tersebut, adapun sebuah kesepakatan untuk hubungan ekonomi, budaya dan hukum yang disepakati oleh kedua negara ini.

2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 23 Februari 1952)

Tanggal 15 Januari 1952 Indonesia yang diwakili oleh Ahmad Soebardjo yang saat itu menjabat sebagai menteri luar negeri Indonesia melakukan pertemuan dengan Marle Cochran selaku Duta Besar Amerika Serikat. Pertemuan ini dalam rangka memperbaiki perekonomian Indonesia dengan menandatangani perjanjian *Mutual Security Act* (MSA). Dalam perjanjian tersebut dibahas tentang bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat untuk Indonesia.

3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Tanggal 30 Januari 1953, di awal tahun melalui kabinet ini Indonesia mengadakan perjanjian dengan India di New Delhi. Pertemuan ini menandakan Indonesia terus menjalin hubungan dengan berbagai negara khususnya di kawasan Asia Selatan. Di tanggal 7 Februari

1953, melalui kabinet ini Indonesia berhasil melakukan perjanjian ekonomi tentang ekspor dan impor barang dengan Pakistan. Penandatanganan ini khususnya bagi Indonesia merupakan perwujudan dari perjanjian yang dilakukan oleh kedua negara di kabinet Natsir. Perjanjian yang ditandatangani di Karachi ini terdapat hal pokok yang hampir sama dengan perjanjian yang dilakukan Indonesia dan India.

4. Kabinet Ali Sastroamidjojo (1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955)

Terjadi perkembangan diplomatic terkait permasalahan pembebasan Irian Barat. Terciptanya hubungan diplomasi Indonesia dengan Cina sampai Konferensi Asia Afrika. Dalam perkembangan hubungan diplomasinya, pada tahun 1954, Indonesia melalui kabinet ini berhasil mengadakan penandatanganan perjanjian persahabatan dengan Kerajaan Thailand. Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1954 ini berisi tujuh pasal yang disepakati oleh kedua negara.

Lima bulan kemudian pada bulan Agustus 1954, Indonesia kembali mengadakan pertemuan dengan Belanda untuk membahas terkait utang-piutang Indonesia dengan Belanda. Melalui pertemuan ini, pada tanggal 11 Agustus 1954 ditandatangani sebuah surat persetujuan yang dihasilkan. Surat tersebut membahas mengenai Indonesia yang akan diberikan oleh pemerintah Belanda sesuai yang merupakan salah satu pasal dari lima pasal yang disepakati. Selain itu, diadakan pula pertemuan kedua untuk membahas terkait permasalahan Irian Barat di bulan yang sama, namun dalam pertemuan itu tidak menghasilkan apapun. "Namun hal lain yang dihasilkan adalah penghapusan Uni Belanda-Indonesia" (Ricklef, 2005).

Dibuka kembalinya perbincangan antara Indonesia dan Cina menjadi salah satu perkembangan dalam hubungan diplomatik Indonesia terkait perjanjian yang pernah disepakati bersama pertama kalinya. Perbincangan yang terjadi pada tanggal 1 September 1954 ini menghasilkan dua surat persetujuan yang ditandatangani oleh Indonesia dengan Cina. Surat-surat yang ditandatangani memiliki tujuan

yang berbeda namun ditandatangani pada tanggal yang sama itu merupakan surat protocol dengan dan surat persetujuan pembayaran antara kedua negara tersebut. Dengan ditandatanganinya naskah-naskah tersebut menjadi suatu gambaran keakraban hubungan diplomatik dua negara yang memiliki pandangan dan ideologinya berbeda.

Selanjutnya, berkaitan dengan permasalahan pokok pada saat itu berkaitan dengan permasalahan Irian Barat, Indonesia mengeluarkan resolusi yang kemudian diberikan kepada Panitia Politik PBB.

Pada tahun 1955, Indonesia kembali bertemu dengan Cina. Pada pertemuan kali ini kedua negara membahas masalah kewarganegaraan untuk orang-orang yang berketurunan Cina di Indonesia. Maka, melalui pertemuan ini, pada tanggal 1955 ditandatangani sebuah perjanjian yang disepakati oleh kedua negara. Kemajuan hubungan luar negeri Indonesia terlihat ketika Indonesia menjadi tuan rumah dari pertemuan regional yaitu konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955.

5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Pada awal pemerintahan kabinet ini terjadi perkembangan diplomatik Indonesia. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tanggal 6 September 1955 ditandai dengan terjalannya hubungan perdagangan antara Indonesia dan Polandia di Jakarta. Tanggal 2 Desember 1955, dibuka lagi perundingan Bilateral dimana Indonesia yang diwakili oleh Anak Agung Gede Agung selalu menteri luar negeri Indonesia pada kabinet ini mengusulkan agar permasalahan Irian Barat dimasukkan ke dalam sidang Dewan Keamanan untuk dijadikan agenda. Usulan ini disampaikan sebelum sidang ke X majelis PBB dan mendapat dukung besar dari negara-negara yang ada di kawasan Asia dan Afrika.

Pada tanggal 10 Oktober 1955 Indonesia dan Mesir mengadakan penandatanganan persetujuan kebudayaan yang menghasilkan 11 pasal yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua negara. Selain dengan Mesir, Indonesia juga berhasil menjalin hubungan kerjasama perdagangan dengan Rumania. Pada pemerintahan kabinet ini setidaknya terjadi enam kali perkembangan diplomatik yang dimana

Indonesia melakukan penandatanganan surat-surat perjanjian dengan berbagai negara. Pada akhir tahun 1955 tepatnya tanggal 29 Desember 1955, Indonesia dan India kembali melakukan penandatanganan persetujuan kebudayaan dan pendidikan di New Delhi. Isi yang tertuang dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa kedua negara akan melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan dan budaya.

6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Oktober 1956 – 4 Maret 1957)

Pada kabinet ini hubungan diplomatik Indonesia berkembang dengan adanya perjanjian persahabatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Irak. Tanggal 3 November 1956, Indonesia bertemu dengan Cina untuk kesekian kalinya dimana dalam pertemuan ini perjanjian perdagangan dengan jangka waktu satu tahun disepakati dan ditandatangani antara Indonesia dan Cina.

7. Kabinet Juanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959)

Dalam kabinet ini, keberhasilan di bidang diplomatik Indonesia mengalami perkembangan. Perkembangan itu terjadi pada tahun 1958, Indonesia dan pemerintah Cekoslowakia menandatangani persetujuan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

Sekitar waktu yang sama, pada bulan Desember, Indonesia yang diwakili oleh A.S. Bachmid bertemu dengan perwakilan dari Kerajaan Iran dalam hal ini Ali Asghar Hekmat. Dalam pertemuan ini kedua negara melakukan persetujuan kerja sama yang ditandatangani pada tanggal 29 Desember 1958. Perjanjian yang ditandatangani di Taheran ini berfokus pada terwujudnya penyelesaian masalah secara damai jika kedua negara sampai terlibat konflik.

“Pada tanggal 27 Januari 1959 di Jakarta, ditandatangani perjanjian antara Indonesia dan Bulgaria. Perjanjian ini ditandatangani di Jakarta. Dalam perjanjian ini disepakati oleh kedua negara untuk melakukan ekspor dan impor barang dari masing-masing negara. Indonesia mengekspor kepada Bulgaria berupa karet, kopi, tee, kopra, kertas, kacang tanah, tempakau, rempah-rempah, minyak sawit, rotan dan kayu manis sedangkan Bulgaria ke Indonesia berupa peralatan mesin, peralatan listrik rumah tangga, alat pertanian, obat-obatan, semen, pesawat telepon, kabel,

gandum dan keju” (Sulfachriadi, 2015 dikutip dari *Trade Agreement Between the Republic of Indonesia and the People’s Republic of Bulgaria*, 1959).

Sebulan setelah penandatanganan perjanjian dengan pemerintah Bulgaria, pada bulan Februari tanggal 13 tahun 1959 Indonesia melakukan penandatanganan perjanjian dengan Kerajaan Kamboja. Kemudian, pada saat itu, disepakati kesepakatan kebudayaan antara Indonesia dan Filipina. Pertemuan ini dilakukan pada Bulan April dan disahkan pada tanggal 28 April 1959. Alasan dari kesepakatan ini adalah untuk saling mengenalkan cara hidup satu sama lain dalam hal ini kebudayaan melalui pesawat radio dan perfilman.

b. Era Demokrasi Terpimpin (1959 – 1967)

Pendeklarasian Dekrit Presiden secara resmi pada tanggal 5 Juli 1959 menjadi tindakan awal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam negeri yang terjadi juga dalam pemerintahan oleh Soekarno. Dekrit yang dikeluarkan oleh presiden Soekarno ini menjadi penanda akhir dari pemerintahan yang dikuasai oleh parlemen. Pada akhirnya, Indonesia memasuki masa yang baru dikarenakan sistem sebelumnya telah berakhir dan mengharuskan Indonesia menerapkan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin.

Dalam pemerintahan yang baru ini perkembangan hubungan diplomasi Indonesia dengan negara lain terus berkembang dengan adanya penandatanganan perjanjian dengan beberapa negara.

Pada tanggal 14 September 1959 ditandatangani perjanjian antara Indonesia dan Turkey. Perjanjian ini ditandatangani di Ankara yang menyepakati *Trade Agreement* antara keduanya. Sejak penandatanganan perjanjian ini Indonesia sudah empat kali mengikuti *Izmir International Trade*. *Izmir International Trade* adalah sebuah pagelaran pameran dagang tertua di Turki dirangkaikan dengan kegiatan festival budaya (Habibi, 2018).

Kira-kira pada waktu yang sama, pada tanggal 17 Desember 1959 sebuah kesepakatan terjadi antara Indonesia dan Australia yang dilaksanakan di Jakarta. Untuk situasi ini, Indonesia menunjuk Soewito Koesowidagdo

sebagai perwakilan dan Australia mengirimkan L. R. Mc Intyre sebagai perwakilan. Dalam pertemuan ini untuk mendapatkan barang-barang produksi yang tidak ada di Indonesia, pemerintah mengandalkan hasil bumi sebagai alat tukar.

Pada awal tahun 1960, kondisi dalam negeri yang dipimpin oleh Presiden Soekarno mengalami perkembangan diplomasi. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan Nikita Khrushchev selaku perdana menteri Uni Soviet atas undangan presiden Soekarno pada tanggal 18 Februari 1960. Melalui kunjungan ini sampai dikenal dengan "Propaganda Khrushchev" oleh Diplomat Jones. Pandangan ini dikarenakan dalam kunjungan perdana menteri Uni Soviet ini kedua negara menyepakati kesepakatan kerja sama, dimana Uni Soviet berjanji akan memberikan pinjaman sebesar \$250 juta untuk Indonesia dan telah ditandatangani oleh kedua pihak (Wardaya, 2008).

Tahun 1960, Indonesia mengadakan pertemuan dengan otoritas publik Iraq pada tanggal 4 dan 5 April 1960. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan sebuah perjanjian dagang dan konsolidasi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang melanda dunia, termasuk penjajahan yang masih terjadi. Dari pertemuan tersebut Indonesia berhasil memperoleh dukungan dari otoritas publik Iraq dalam usahanya untuk mengambil alih Irian Barat dan menjadikannya satu kesatuan dengan Indonesia (Sulfachriadi, 2015 dikutip dari Surat Perjanjian Dagang dan Pernyataan Bersama Antara Republik Indonesia dan Republik Iraq, 1960).

Hubungan diplomasi terus diperluas dalam pemerintahan ini, salah satunya dengan Indonesia mengunjungi Bulgaria dan mengajukan konsolidasi bersama tentang upaya untuk menghentikan pengujian senjata nuklir dan demiliterisasi dalam rangka menciptakan perdamaian di dunia internasional. Kunjungan dilaksanakan selama 4 hari dimulai pada tanggal 8-11 April 1960. Pemerintah Indonesia juga mendapat dukungan dalam usaha memasukan Irian Barat ke dalam bagian negara Indonesia (Sulfachriadi, 2015 dikutip dari Surat Pernyataan bersama Indonesia-Bulgaria Tentang kunjungan Presiden Republik Indonesia, Dr. Soekarno ke

Republik Rakyat Bulgaria dari Tanggal 8 April Sampai 11 April, 1960).

Pemerintah Indonesia juga melakukan kunjungan ke Hongaria dalam usahanya untuk menentang semua jenis ekspansionisme dana mengencana bentuk-bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Afrika Selatan. Dalam kunjungan yang dilakukan pada tanggal 14-17 April 1960 menghasilkan sebuah kesepakatan antara kedua negara yang ditandatangani pada tanggal 17 April. Pemerintah Hongaria juga memberikan dukungan kepada Indonesia berkaitan dengan usahanya memasukan Irian Barat menjadi satu kesatuan dengan NKRI (Sulfachriadi, 2015 dikutip dari Surat Perjanjian Bersama Indonesia – Hongaria Pada Peristiwa Kunjungan Presiden Republik Indonesia Dr. Soekarno ke Republik Rakyat Hongaria, 1960).

Kunjungan selanjutnya yang dilakukan Indonesia adalah pada tanggal 9-14 Mei 1960 ke negara Cuba. Ditanggal 13 Mei 1960 kerja sama di bidang kebudayaan terjalin dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama. Selain itu juga ada pernyataan bersama yang disepakati. Kedua negara tersebut sama-sama sepakat untuk penghapusan segala bentuk kolonialisme dan memberikan dukungan kepada negara-negara yang masih memperjuangkan hak-hak mereka. Presiden Soekarno juga berdiskusi dengan Fidel Castro tentang konsep Marhaenisme, kemandirian di bidang ekonomi dan tentang perjuangan rakyat yang seharusnya menjadi tuan rumah di negerinya sendiri tanpa dikte dari imperialism (Faranita, 2015). Untuk menambah pengalaman, kedua negara juga menyepakati pertukaran tenaga pengajar.

Permasalahan Irian Barat masih belum terselesaikan dengan cara damai yang telah berlangsung selama 10 tahun, sehingga pemerintah Indonesia memilih untuk mengambil jalan lain. Dalam keadaan ini, secara konsisten, kegiatan-kegiatan untuk mengusahakan kemerdekaan Irian Barat disebarluaskan ke seluruh pelosok tanah air. Kaum buruh dan karyawan mengambil alih organisasi-organisasi milik Belanda di wilayah Indonesia dan menyerahkan kepada otoritas publik. "Hubungan yang tegang antara Indonesia dengan Belanda itu mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus

1960 dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Kerajaan Belanda” (Marwati, 1984).

Pada perkembangannya memasuki tahun 1961 berdasarkan perkembangan diplomatik tahun sebelumnya, maka ditahun ini perkembangan diplomatik Indonesia juga masih terus berlangsung. Adapun beberapa hubungan diplomasi yang berhasil terjalin seperti pada tahun 1961 tanggal 27 Mei Indonesia mempererat kembali hubungan diplomasi mereka dengan menandatangani perjanjian persahabatan untuk kedua kalinya. Perjanjian yang bersifat 5 tahun diwakili oleh A. S. Bachmid yang merupakan perjanjian pertama. Kedua kalinya Indonesia diwakili oleh Ir. Juanda dan tidak ada batas waktu dalam perjanjian tersebut. Tanggal 29 Mei 1961, setelah dua hari Indonesia mempererat juga hubungan diplomasinya dengan pemerintah Cekoslowakia dengan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

Indonesia mencoba menjalin dengan negara di Asia Tenggara yaitu pada tanggal 29 Juni 1962 Singapura yang melakukan penandatanganan perjanjian perdagangan dan perekonomian. Dalam penandatanganan ini Indonesia mengirim perwakilan untuk bertemu dengan pihak Singapura dalam hal ini diwakili oleh Mr. Arifin Harahap dan Dr. Goh Keng Swee mewakili Singapura. Seperti Singapura, Indonesia juga menjalin hubungan persahabatan dan hubungan dagang dengan Jepang. Penandatanganan perjanjian ini yang bertujuan untuk memperkuat hubungan kedua negara ini dilakukan pada tanggal 1 Juli 1961 secara sah. Selain menyepakati terjadinya kemajuan di bidang ekonomi, kedua negara juga sepakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Pembebasan Irian Barat

“Berbagai usaha dalam bidang diplomasi telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendapatkan dukungan dari berbagai negara terkait masalah Irian Barat. Dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 1961 kembali masalah Irian Barat diperdebatkan” (Marwati, 1984). U Thant selaku Sekretaris Jenderal PBB menunjuk

Ellswort Bunker seorang diplomat dari AS untuk mencari solusi dari permasalahan Indonesia dan Belanda terkait Irian Barat. Maret 1962 rencana Bunker diterima oleh kedua negara tersebut, meskipun sedikit diulur waktunya sampai bulan Juli 1962. Dalam perundingan 1 Juli 1962 itu, sebuah catatan dari Sekretaris Jenderal PBB diberikan kepada kedua negara yang berkonflik, dimana dalam catatan tersebut terdapat fokus utama dari rencana Bunker ini, seperti:

1. Selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1962 utusan dari PBB akan mengoper pemerintah Irian Barat dari Belanda. Pada tanggal 1 Oktober itu bendera Belanda akan diturunkan dan diganti dengan bendera PBB.
2. Penguasa PBB akan menggunakan tenaga-tenaga Republik Indonesia bersama-sama dengan alat-alat yang sudah ada di Irian Barat yang terdiri atas penduduk Irian barat.
3. Pasukan Indonesia yang sudah ada di sana akan tetap tinggal di Irian Barat di bawah kekuasaan PBB.
4. Angkatan Perang Belanda berangsur-angsur akan dipulangkan ke negeri Belanda.
5. Antara Irian Barat dan daerah Republik Indonesia lainnya akan dibuka lalu lintas bebas.
6. Pada tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia akan dikibarkan di Irian Barat di samping bendera PBB.
7. Pada tanggal 1 Mei 1963 pemerintah Indonesia secara resmi akan mengoper pemerintah Irian Barat dari PBB.
8. Pada tahun 1969 akan diadakan pemungutan suara untuk menentukan Irian Barat akan tetap di dalam atau ke luar dari Republik Indonesia. (M Sabir, 1987)

Secara fundamental, pemerintah Indonesia mendukung usulan tersebut dengan catatan bahwa kurun waktu dua tahun tersebut diperpendek. Sebaliknya, pemerintah Kerajaan Belanda mempunyai pendapat bahwa Kerajaan Belanda akan melepaskan Irian Barat dengan membentuk dulu perwakilan di bawah PBB untuk

kemudian membentuk Negara Papua. Sikap Kerajaan Belanda itu disambut oleh Indonesia dengan membulatkan tekad untuk mengadakan perjuangan bersahabat. Yang oleh Presiden Soekarno diformulasikan sebagai “Politik Konfrontasi Disertai Dengan Uluran tangan” (Marwati, 1984).

“Pernyataan sikap ini menandakan dimulainya konfrontasi total terhadap Belanda, maka pada tanggal 2 Januari 1962 Presiden/Pangti ABRI/Panglima Besar Komando tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan Keputusan No. 1 tahun 1962 membentuk: Komando Mandala Pembebasan Irian Barat” (Marwati, 1984). Pernyataan sikap ini dibuktikan dengan dikuasainya kota Teminabuan dimana pasukan Indonesia melakukan penyusupan ke daerah tersebut.

Mengenai rencana yang akan dilakukan Indonesia yang melakukan operasi militer ke wilayah kekuasaan Belanda di Irian Barat. Mengakibatkan peristiwa tragis . peristiwa ini dikenal dengan pertempuran Laut Aru, dimana dalam pertempuran ini menewaskan Deputi Kasal, Komodor (Laksamana Pertama) Yos Sudarso. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 15 Januari 1962, dimana dalam peristiwa ini terjadi pertempuran yang tidak seimbang antara MTB ALRI melawan kapal perusak dan *fregat* Belanda.

Disisi lain, otoritas public Belanda cukup banya berada di bawah tekanan dari AS untuk melakukan perundingan. Selanjutnya, AS juga meyakinkan pihak Indonesia untuk bertindak secara dwas. Dengan pengaruh tersbut maka pada tanggal 15 Agustus 1962 terjadi kesepahaman anantara Indoensia dengan Belanda di Neww York yang dikenal dengan “*New York Arrangement*”. Beberapa hal yang disepakati dalam perjanjian itu seperti:

“(a)Segera setelah Resolusi Majelis Umum PBB dikeluarkan, (pemerintah) Belanda akan mengalihkan pemerintahan kepada UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority* atau Otoritas Eksekutif Sementara PBB). (b)UNTEA akan menentukan dimulainya proses peralihan pemerintahan kepada Indonesia sewaktu-waktu setelah Mei

1963. (c)Pasukan Indonesia yang berada di Irian barat akan berada di bawah kendali UNTEA. (d)UNTEA boleh mendayagunakan para pejabat baik Indonesia dan Belanda. (e)Satu tahun sebelum “penentuan pendapat rakyat” (Pepera) yang mesti dilaksanakan sebelum tahun 1969, Sekjen PBB akan menunjuk wakilnya dan staf untuk menasehati dan membantunya dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. (f)Bendera Indonesia boleh dikibarkan di samping bendera PBB mulai Januari 1963”

“Dengan ditandatangani Perjanjian New York tersebut, maka berakhirilah sengketa dua belas tahun yang mengganggu hubungan kedua negara” (Sabir, 1987). Hal ini ditandai dengan penyerahan Irian Barat oleh UNTEA dalam hal ini sebagai pihak penengah pada tanggal 11 Mei 1963. Pada tanggal 5 September 1963, pemerintah Indonesia melakukan pembubaran Dewan Papua dan lagu Papua Barat dan pengimbaran Bendera dilarang dengan menjadikan Irian Barat sebagai wilayah karantina.

Dampak Pelaksanaan Strategi Politik Luar Negeri Bebas Aktif Bagi Indonesia dan Dunia Internasional

a. Impact on Politics

1. Konsep Politik Kawasan/Geopolitik

Dampak pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di bidang politik yaitu dengan dikeluarkanya Deklarasi Juanda wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh maka, peta politik juga ikut berubah. Politik Indonesia tidak lagi politik pulau, tetapi lebih kepada konsep politik nasional. Indonesia adalah salah satu Kawasan terbesar di dunia(Rahman, n.d.), maka konsep politik yang cocok dipakai ialah konsep politik Kawasan atau Geopolitik. (Aman, 2013).

2. Indonesia masuk PBB

Pada tahun 1945 setelah kemerdekaan, kondisi Indonesia belum stabil. Indonesia masih membutuhkan bantuan dari negara-negara lain untuk mencapai tujuan nasionalnya. Selain itu, tujuan Indonesia masuk PBB adalah untuk menunjukkan keberadaanya di dunia internasional serta diakui kemerdekannya. Oleh

sebab itu, Indonesia menjalin kerja sama dengan negara lain baik dalam bentuk bilateral, multilateral, maupun melalui organisasi internasional. Pada tanggal 28 September 1950 Indonesia resmi bergabung dalam PBB sebagai negara ke-60. Dengan masuknya Indonesia ke dalam PBB secara tidak langsung kemerdekaan Indonesia telah diakui oleh negara-negara lain yang menjadi anggota PBB dan memiliki kedudukan yang sama dengan 59 negara lain. Indonesia juga memiliki hak yang sama dengan negara lainnya untuk ikut menciptakan dan melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia serta dapat turut serta memecahkan permasalahan-permasalahan dunia.

3. Penyelenggaraan Pemilu Pertama

Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada tanggal 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). “Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Pemilu pertama ini menghasilkan partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi dan PKI” (Marwati, 1984).

4. Pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB)

Pada tanggal 3 Mei 1956, Indonesia secara sepihak membatalkan hubungan dengan Belanda berdasarkan perundingan KMB dengan UUN. 13 Tahun 1956. Dalam undang-undang itu ditetapkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Belanda adalah hubungan yang lazim antara negara yang berdaulat penuh berdasarkan hukum internasional. Dengan Undang-undang itu bias ditafsirkan bahwa Indonesia membubarkan Uni Indonesia – Belanda secara sepihak. Dengan ditandatangani undang-undang tersebut menimbulkan persoalan tentang bagaimana nasib modal Belanda yang ada di Indonesia. Dianjurkan untuk mengadakan nasionalisasi atau Indonesianisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda (Marwati, 1984).

5. Kegagalan Pemberontakan G30S/PKI

Konstelasi politik dalam negeri yang timbul sebagai akibat gagalnya pemberontakan G30S/PKI telah menyebabkan Indonesia kembali kepada Demokrasi Pancasila. Pimpinan negara berpindah dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto (Marwati, 1984)

b. *Impact on the Economy*

1. Adanya Sumitro Plan

Program ini dirintis oleh menteri perdagangan Indonesia dalam kabinet Natsir dalam hal ini Sumitro. Program moneter ini dikenal dengan Program Pembiayaan Pembangunan Banteng atau lebih dikenal dengan Program Banteng. Tujuan utama dari program ini adalah pengaturan modal yang dukup besar melalui pertukaran impor yang benar-benar bermanfaat bagi peluang memulai bisnis untuk membangun usaha kecil. Tujuan dari program ini adalah :

“(a)Menumbuhkan dan membina para pelaku usaha Indonesia (pribumi) sambil menumbuhkan nasionalisme ekonomi atau Indonesianisasi. (b)Mendorong para importir nasional agar mampu bersaing dengan perusahaan impor asing. (c)Membatasi impor barang-barang tertentu dan memberikan lisensi impor hanya kepada para importir Indonesia. (d)Memberi bantuan dalam bentuk kredit keuangan kepada para pengusaha di Indonesia” (Dias, 2019).

2. Dikeluarkannya Deklarasi Djuanda

Dampak dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di bidang ekonomi salah satunya dapat dilihat pada masa Kabinet Juanda berjalan yaitu dengan dikeluarkannya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, “Indonesia memberlakukan asas negara kepulauan bagi seluruh wilayahnya dan jarak 3 mil tidak berlaku lagi, tetapi menjadi 12 mil, sehingga dengan begitu tidak ada lagi istilah laut bebas di antara wilayah Indonesia” (Aman, 2013: 87). Selain itu dengan bertambahnya wilayah Indonesia maka ekonomi akan menjadi kuat dan maju karena wilayah laut Indonesia kaya akan sumber daya alam yang dapat membuat perekonomian Indonesia maju pesat.

3. Politik Ekonomi (*G to G*)

Politik Ekonomi berhubungan dengan bantuan yang diterima oleh Indonesia dari RCC melalui perdagangan bilateral atas dasar *Government to Government (G to G)*. Sebagai contoh dapat disebutkan di sini perdagangan karet. Ekspor karet Indonesia ke RCC diselenggarakan dengan *check price* rendah, dan oleh RCC diatur dengan baik sehingga karet tersebut jatuh di Singapura dengan harga lokal sampai berselisih 5

– 6 \$ sen/lbs dan setelah diolah menjadi karet yang lebih baik kualitasnya kemudian dikirim ke RCC atau Hongkong sebagai bahan baku (Marwati, 2007: 434).

4. Kebijakan Kredit Luar Negeri

Akibat dari kebijakan kredit luar negeri yang dijalankan, utang-utang negara semakin besar dan sebaliknya ekspor semakin menurun. Utang luar negeri dibayar dengan kredit baru melalui penangguhan pembayaran. Indonesia tidak mampu lagi membayar tagihan-tagihan luar negeri sehingga terjadi *insolvensi* internasional. Akibatnya, beberapa negara memberhentikan imponya ke Indonesia karena utang-utang yang tidak dibayar. Kondisi dalam negeri sendiri sangat terganggu, menghambat, dan mengacaukan produksi, distribusi, dan perdagangan serta menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat (Marwati, 2007).

c. Impact in the Social Sector

1. Perasaan Anti Cina

Setelah pembatalan KMB, banyak perusahaan-perusahaan Belanda menjualnya kepada orang-orang Cina karena pada umumnya merekalah kaum yang ber-uang. Orang-orang Cina sudah sejak lama mempunyai kedudukan yang kuat dalam perekonomian Indonesia. Perasaan anti-Cina ini menimbulkan tindakan kekerasan antara lain pengrusakan toko mobil milik seorang pengusaha keturunan Cina sebagai dalang dari pemukulan terhadap seorang dokter tantara. Adapun tulisan-tulisan anti-Cina disebar, baik di Jakarta, Bandung, Semarang maupun Sala (Marwati, 1984).

2. Larangan Pedagang Asing di luar Ibukota Daerah

Pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi konflik antar pedagang asing, terutama Cina. Pada tanggal 1 Januari 1960, pedagang-pedagang asing dilarang berdagang di pedesaan. Akibatnya, banyak di antara mereka yang dipindahkan ke kota. Oleh karena kebijakan tersebut pemerintah di Beijing memberikan reaksi keras terhadap usaha tantara Indonesia melarang warga negara asing (etnis Cina) bergerak dalam bidang usaha eceran di luar kota-kota besar.

3. Kerusuhan di Jakarta

Pada masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia, keadaan social Indonesia mulai kacau.

Kedutaan besar Inggris dan 21 rumah stafnya dibakar habis di Jakarta. Rakyat di Jakarta yang menganggap Proklamasi Federasi Malaysia sebagai perwujudan "*act of bad faith*" dari Tengku Abdul Rachman sehingga terjadi demonstrasi-demonstrasi yang dibalas pula dengan demonstrasi-demonstrasi besar terhadap Kedutaan Besar RI di Kualalumpur. Hal ini berujung pada pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura (Marwati, 1984).

Simpulan

Perseteruan antara kedua kekuatan dunia yang merupakan pemenang dalam perang dunia kedua sangat berdampak besar dalam dunia internasional. Untuk menghadapi hal tersebut kebijakan luar negeri perlulah dirancang terutama sebagai negara baru, Indonesia memerlukan suatu arah kebijakan luar negeri untuk mencapai tujuan dan mewujudkan cita-cita bangsa. Dalam perancangannya Indonesia melaksanakan strategi netralitas (ketidakberpihakan) sebagaimana Indonesia menjalankan kebijakan luar negerinya berdasarkan prinsip bebas-aktif. Dalam mewujudkan tujuannya Indonesia menempuh dua strategi yaitu dengan menggunakan perjuangan fisik dan dengan diplomasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam keikutsertaan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok. Kebijakan luar negeri ini berdasarkan pada amanat yang terkandung dalam UUD 1945 dan landasan idiil Pancasila serta landasan operasional yang ada.

Setelah tahun 1950 Indonesia masuk pada masa pemerintahan demokrasi liberal, di mana selama masa pemerintahan ini terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Selama masa pemerintahan kabinet-kabinet ini terdapat program kerja yang telah direncanakan selama kabinet tersebut berlangsung. Secara keseluruhan kabinet-kabinet tersebut berfokus pada pembebasan Irian Barat dan dimasukkan kembali ke dalam wilayah NKRI serta pada hubungan diplomasi Indonesia dengan negara-negara lain. Selain itu terdapat beberapa program kerja lain yang berfokus pada permasalahan dalam negeri sendiri. Pencapaian dari masa ini yaitu salah satunya terselenggaranya Pemilihan Umum I dan terselenggaranya Konferensi Asia Afrika.

Adapun hubungan-hubungan kerja sama yang berhasil dijalin negara-negara lain.

Setelah pemerintahan demokrasi liberal berakhir dengan keberhasilan dan kegagalannya, Indonesia melanjutkan pemerintahannya dengan demokrasi terpimpin. Dalam pemerintahan ini Presiden berperan besar dan segala pusat keputusan dan pemikiran adalah kepala negara. Dalam masa pemerintahan ini perkembangan diplomatik Indonesia terus berkembang dengan adanya penandatanganan perjanjian dengan beberapa negara. Pada masa ini cita-cita untuk membebaskan Irian Barat dan memasukan kembali ke wilayah NKRI terwujud dengan berbagai cara dan perundingan sampai pada penandatanganan *Perjanjian New York* sehingga Indonesia berhasil dalam tujuannya.

Implementasi strategi internasional Indonesia yang berlandaskan prinsip netralitas dengan melihat kondisi Indonesia sendiri pada saat itu menyebabkan beberapa perubahan di berbagai bidang. Dampak perubahan itu dapat dilihat dari bidang politik, ekonomi dan sosial. Tentu saja strategi ini memberikan dampak baik positif maupun negatif yang dirasakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aman, F. P. 2013. Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Kabinet Djuanda 1957-1959. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Vol 10, No. 1, Mei 2013, 80-90.
- Arifin Z, dkk. 2018. Politik Luar Negeri Masa Transisi Pemerintahan Orde Lama Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1973. *Jurnal Pattingalloang* Vol 5, No. 1, Januari 2018, 100-111.
- Ayuningtyas, D. R. Suharso, R. Sodik. I. 2016. Perjuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman Pada Masa Revolusi Fisik Tahun 1945-1949. *Jurnal of Indonesian History* Vol 5, No.1, 2016.
- Habibi, M. I. 2018. Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Turki Pada Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Periode 2009-2014. *FISPOL Universitas Islam*

Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. 30-31.

- Malintan, D, A. 2019. Perkembangan Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal (e – modul). Direktorat Pembinaan SMA – Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.
- Marwati, D. P, dkk. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Mujiyati, N. Kuswono. Sunarjo. 2016. United States During The Cold War 1945-1990. *Jurnal Historia* Vol 4, No. 1, (2016).
- Murtamadji. 2009. Kegagalan Perang Dingin Antara Dua Negara Adidaya; Faktor Penyebab dan Implikasinya. *Jurnal Humanika* Vol 9, No. 1, Maret 2009, 81-92.
- Noer, A. Efantino, F. 2009. *Gayang Malaysia*. Yogyakarta: Bio Pustaka.
- Penulis, T., Nuriyati, T., Falaq, Y., Deni Nugroho, E., Harapin Hafid, H., Fathimah, S., Ardiansyah, R., Firmansyah, H., Saragih, E., Nofriyaldi, A., Komar, A., Palangda, L., Nurhafari, A., & Sri Wahyuni, N. (2022). *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN (TEORI & APLIKASI)*. www.penerbitwidina.com
- Rahman, E. Y. (n.d.). *Tarian Adat Kabasaran Di Minahasa (Analisis Nilai Budaya Dan Peluangnya Sebagai Sumber Pendidikan Karakter)*.
- Ricklef. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi.
- Sabir, M. 1987. *Politik Bebas Aktif, Tantangan dan Kesempatan*. Jakarta: haji Masugung.
- Siswoyo, D. 2013. Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendidikan* Vol 32 No.1. 111.

- Sulfachriadi. 2016. *Politik Luar Negeri Pada Masa Pemerintahan Soekarno (1949-1966)*. Makassar: FIS UNM.
- Wardaya, B. 2008. *Indonesia Melawan Amerika*. Yogyakarta: Galangpress: Cet. I, 2008.
- Widjaja, A. W. 1985. *Indonesia Asia Afrika Non Blok Politik Bebas Aktif*. Jakarta: PT Bina Aksara.